

## **POST-PANDEMI COVID-19 ECONOMIC RECOVERY**

**Adrian, Kuncoro Wibowo, Samuel Horas Sarjana**  
STIE Jayakarta

### **ABSTRACT**

Covid-19 is impacting the whole country including Indonesia, the ever-increasing distribution of covid-19 is causing economic growth pressures. Indonesia's economic growth ranged from -2.1% yoy by 2020, placing Indonesia in fourth place, after Vietnam, China and South Korea. Indonesia's economic contraction is relatively moderate, one of the smallest between the G-20 and ASEAN. Impact on the economic sector due to the covid-19 pandemic in Indonesia, among others, the occurrence of layoffs, decreased imports, rising prices (inflation) as well as losses in the tourism sector that led to a decrease in occupancy. Economic policy in the form of relaxation of economic policy is expected to increase purchasing power and economic movement in all areas.

**Keywords:** Covid-19, Economic Growth, Economic Policy Relaxation

## **PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19**

### **ABSTRAK**

Covid-19 berdampak terhadap seluruh negara termasuk Indonesia, penyebaran Covid-19 yang terus meningkat menyebabkan tekanan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar -2,1% yoy di tahun 2020, menempatkan Indonesia pada urutan ke empat, setelah Vietnam, Tiongkok dan Korsel. Kontraksi ekonomi Indonesia relatif moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN. Dampak pada sektor ekonomi akibat pandemi covid-19 di Indonesia antara lain terjadinya PHK, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi. Kebijakan ekonomi yang dilakukan berupa relaksasi kebijakan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan daya beli serta pergerakan ekonomi di semua bidang.

**Kata-kata Kunci:** Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi, Relaksasi Kebijakan Ekonomi

**Korespondensi:** Adrian, SKom, MMSI. STIE Jayakarta, Jalan Salemba I No.10, RT.4/RW.6, Jakarta 10430. Email: [adrian@stie.jayakarta.ac.id](mailto:adrian@stie.jayakarta.ac.id)



sebagian besar industri dilarang beroperasi dan dampak dari kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan mata rantai pasokan akan terkena dampaknya juga, termasuk terganggunya produksi barang dan jasa.

Pandemi COVID-19 yang menyebar secara cepat dan mengancam kesehatan publik, mendorong negara-negara untuk mengambil berbagai langkah pencegahan yang ekstrim. Salah satu langkah kebijakan yang diambil hampir semua negara adalah pelarangan atau pembatasan perjalanan (travel ban/restriction), penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar wilayah/negara. Di dalam skala domestik, beberapa negara memberlakukan lockdown yakni penutupan wilayah dan penghentian segala aktivitas publik kecuali yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan medis, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok, Italia, Malaysia, India. Physical distancing serta karantina mandiri termasuk dengan memindahkan aktivitas kantor, belajar, dan beribadah di rumah juga diimplementasikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dikurangi atau bahkan dilarang dengan pengawasan ketat dari aparat hukum. Di beberapa negara seperti Singapura bahkan Pemerintah akan memberikan sanksi hukuman dan denda apabila distancing tidak dipatuhi. Tes COVID-19 bersifat cepat (rapid) dan masif (massive) serta penelusuran (tracing) juga menjadi tonggak kebijakan utama untuk dapat memutus rantai

penyebaran virus. Di Indonesia, Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, memberlakukan kebijakan physical distancing, serta menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Berbagai himbauan termasuk menganjurkan dan bahkan melarang masyarakat untuk tidak melakukan pulang kampung termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Penyebaran COVID-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia juga memberi tantangan serius pada stabilitas sektor keuangan. Volatilitas di sektor keuangan global meningkat sangat tinggi bahkan melebihi beberapa krisis terdahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kekhawatiran investor terhadap penyebaran COVID-19 serta dampaknya yang mendalam pada perekonomian global. Alhasil, kinerja sektor keuangan global tertekan cukup dalam. Ketidakpastian yang tinggi pada perekonomian global telah mengganggu

confidence di pasar keuangan. Indeks volatilitas (VIX Index), yang menunjukkan ekspektasi volatilitas pasar saham di Amerika Serikat, sempat berada di titik tertinggi sepanjang masa yaitu 82,69 pada 16 Maret 2020 yang mencerminkan adanya kekhawatiran di pasar keuangan walaupun mulai menunjukkan tren menurun sampai dengan 45,41 pada tanggal 21 April 2020. Pasar saham dan nilai tukar bergejolak di tengah terjadinya arus modal keluar (capital flight) dari negara berkembang yang sangat tinggi dan cepat, serta peralihan ke safe haven assets khususnya dolar AS. Harga minyak global juga turun tajam lebih dari separuh dari harga di awal tahun, dibayangi oleh perkiraan guncangan (shock) di sisi permintaan akibat COVID-19 serta diperparah dengan guncangan (shock) penawaran akibat perang harga minyak antara Rusia dan Arab Saudi.

Dampak dari COVID-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan COVID-19 yang extraordinary dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (demand) maupun sisi penawaran (supply), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan

dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat COVID-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

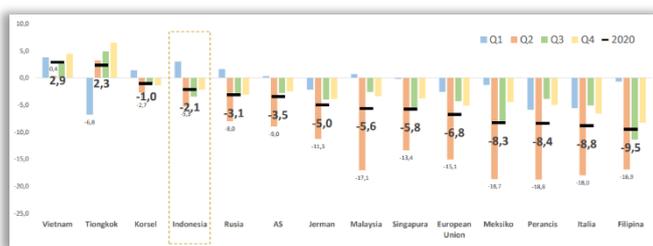
## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mengumpulkan data secara detail dari berbagai literatur seperti jurnal ilmiah dan internet kemudian disampaikan kesimpulan yang mendalam secara sistematis dan juga aktual

## **III. PEMBAHASAN**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan, teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan pandangan ahli ekonomi, Robert Solow.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar -2,1% yoy di tahun 2020. Pertumbuhan ini menempatkan Indonesia pada urutan ke empat, setelah Vietnam, Tiongkok dan Korsel. Kontraksi ekonomi Indonesia relative moderat, salah satu yang terkecil di antara G-20 dan ASEAN (Gambar 2)



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Berbagai Negara (% yoy) selama Covid-19  
(Sumber : Bloomberg, Trading Economics, dan BPS, 2020)

Selama kondisi pandemik ini, pertumbuhan ekonomi hampir semua negara mengalami penurunan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS, Euro Area dan Jepang, misalnya, akan tumbuh negatif masing-masing di tingkat -5,9 persen, -7,5 persen, dan -5,2 persen. Sementara untuk Tiongkok, India, dan ASEAN-5 lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tingkat 1,2 persen, 1,9 persen dan -0,6 persen. Pada Gambar 3, digambarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk periode 2020-2021.

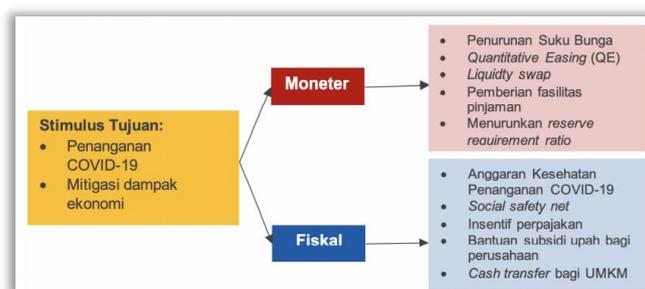


Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 - 2021  
(Sumber : KEM PPKF, 2021)

IMF mencatat 213 negara di dunia telah mengeluarkan stimulus dalam rangka penanganan COVID-19 danantisipasi dampaknya pada

ekonomi, dengan total stimulus mencapai USD8 triliun atau hampir setara 10 persen dari PDB dunia. Secara garis besar, stimulus fiskal yang dialokasikan oleh negara-negara memberikan fokus pada peningkatan anggaran kesehatan dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu, bantuan pada masyarakat dan rumah tangga juga umumnya diberikan oleh Pemerintah dalam berbagai bentuk seperti bantuan tunai dan jaminan sosial. Untuk sektor usaha yang terkena dampak dari COVID-19, diberikan skema bantuan berupa penundaan pembayaran pajak hingga jaminan pinjaman.

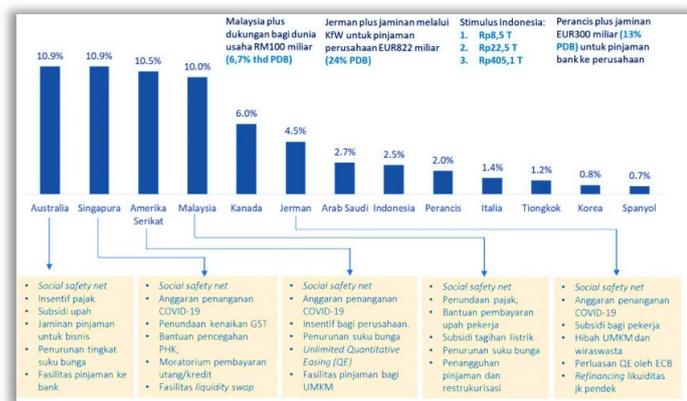
Beberapa negara G20 dan ASEAN yang telah mempersiapkan stimulus besar untuk menghadapi COVID-19 dan dampaknya adalah Australia (10,9 persen terhadap PDB), Singapura (10,9 persen), Amerika Serikat (10,5 persen) dan Malaysia (10 persen). Langkah yang dilakukan Malaysia juga ditambah dengan dukungan bagi dunia usaha sebesar 6,7 persen terhadap PDB. Jerman dan Perancis termasuk di antara negara yang menyiapkan jaminan untuk pinjaman perusahaan masing-masing sebesar 24 persen dan 13 persen terhadap PDB.



Gambar 4. Stimulus selama COVID-19  
(Sumber : KEM PPKF, 2021)

Dukungan fiskal yang diarahkan langsung kepada penanganan COVID-19 dan upaya menjaga kesehatan masyarakat menjadi fokus utama bagi seluruh negara. Amerika Serikat misalnya, dari total stimulus sekitar USD 2 triliun sebagian dialokasikan untuk pengembangan vaksin dan pelaksanaan tes COVID-19 yang masif.

Pengadaan berbagai alat kesehatan serta peningkatan skema jaminan kesehatan turut menjadi berbagai program utama kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang tuntas. Tiongkok bahkan mendirikan rumah sakit darurat untuk penanganan pasien COVID-19 yang selesai dibangun hanya dalam kurun waktu 10 hari. Di samping itu, berbagai program dalam rangka menjaga agar perekonomian individu dan industri dapat terlindungi di tengah pandemi COVID-19 dilakukan termasuk pemberian bantuan langsung untuk individu, bantuan pembayaran upah pekerja, insentif pajak, hingga subsidi tagihan listrik. Di sisi moneter, langkah berbagai bank sentral dan otoritas juga sangat ekstensif dengan memanfaatkan berbagai instrumen moneter. Penurunan suku bunga acuan menjadi salah satu kebijakan umum yang diambil, dan terjadi di berbagai negara. Otoritas moneter AS, the Federal Reserves (The Fed) menjadi salah satu yang paling agresif dengan melakukan dua kali pemangkasan suku bunga di bulan Maret 2020 dengan total 150 bps, sehingga suku bunga acuan berada di tingkat 0,0–0,25 persen. Di samping penurunan suku bunga, The Fed beserta beberapa bank sentral negara besar seperti European Central Bank (ECB) melakukan dan memperluas program pembelian aset (quantitative easing/QE). Kebijakan QE yang dilakukan oleh The Fed dan ECB bersifat tanpa batas (unlimited). Beberapa langkah moneter dan sektor keuangan lain yang diambil oleh negara-negara di dunia antara lain injeksi dana dalam bentuk fasilitas pinjaman untuk bank, penangguhan pinjaman dan restrukturisasi, refinancing likuiditas jangka pendek, hingga penyediaan fasilitas liquidity swap. Pada Gambar 5 dijelaskan mengenai perbandingan dukungan Fiskal beberapa negara dalam menghadapi COVID-19.



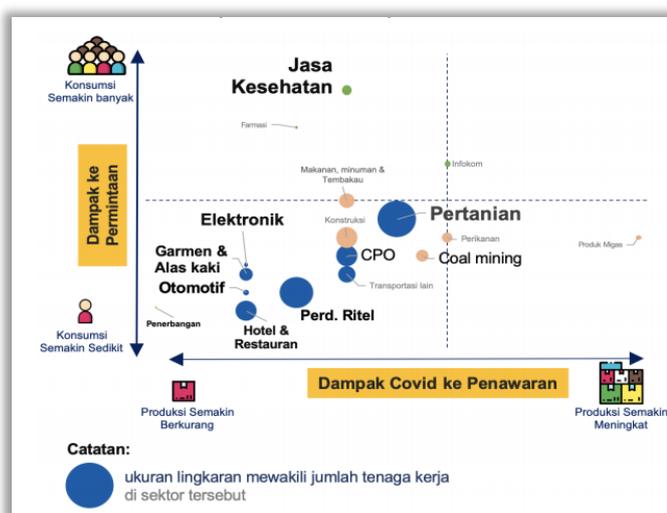
Gambar 5. Perbandingan dukungan Fiskal beberapa negara menghadapi COVID-19 (Sumber : KEM PPKF, 2021)



Gambar 6. Bauran Kebijakan Ekonomi Extraordinary Indonesia untuk Penanganan COVID-19 dan Mitigasi Dampak Ekonomi (Sumber : KEM PPKF, 2021)

Pada Gambar 6, digambarkan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19. Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia di tahun 2020 juga terkena dampak COVID-19. Kepanikan di pasar keuangan global telah menyebabkan terjadinya pembalikan modal dan peningkatan tekanan pada pasar mata uang, pasar modal dan pasar obligasi di Indonesia. Dalam periode krisis ekonomi global di tahun 2009, sektor keuangan Indonesia masih mencatat arus modal masuk sebesar Rp69,9 triliun. Namun dalam periode Januari–April 2020, telah terjadi arus modal

keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp159,6 triliun, baik di pasar saham, pasar SBN maupun SBI. Hal tersebut mendorong kenaikan yield SUN 10 tahun yang meningkat ke level di atas 8 persen, IHSG yang melemah tajam hampir 28 persen serta nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi sekitar 9,0 persen ytd di akhir April 2020. Gambar 7 menjelaskan dampak Covid-19 terhadap permintaan dan penawaran.



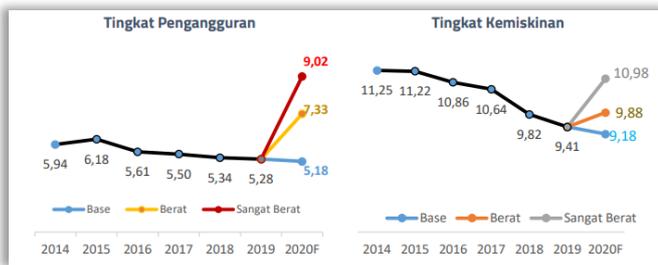
Gambar 7. Dampak COVID-19 terhadap Permintaan dan Penawaran  
(Sumber : COVID-19 Sectoral Analysis, Prospera 2020)

Secara umum, analisis eksposur dampak pandemi terhadap berbagai sektor diilustrasikan pada Gambar 8. Di samping sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, aktivitas pendukung lainnya seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor, dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya pandemi tersebut.

<b>Eksposur Tinggi</b>	- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum - Transportasi dan Pergudangan	- Industri Pengolahan - Jasa Penerbangan - Jasa Pembiayaan Kredit Motor
<b>Eksposur Moderat</b>	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Jasa Keuangan dan Asuransi - Pertambangan dan Penggalian	- Informasi dan Komunikasi - Jasa Perusahaan - Pembiayaan KPR
<b>Eksposur Rendah</b>	- Konstruksi - Real Estat - Pengadaan Listrik, Gas - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	- Jasa lainnya - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

Gambar 8. Dampak COVID-19 terhadap Berbagai Sektor  
(Sumber : OCE, BPS, data IO diolah 2020)

Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan pemburukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah kesehatan dan kematian akibat penularan COVID-19 yang sangat cepat serta langkah pembatasan sosial juga telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, yang berdampak pada jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam skenario berat, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan dapat meningkat menjadi 7,33 persen dari 5,28 persen di tahun 2019. Di skenario yang sama, tingkat kemiskinan dapat meningkat menjadi hampir 9,9 persen dari angka di tahun 2019 sebesar 9,41 persen. Bahkan dalam skenario sangat berat, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat menjadi masing-masing 9,02 persen dan 10,98 persen. Dilihat dari tambahan jumlah orang, peningkatan persentase tersebut mengakibatkan tambahan jumlah pengangguran dalam rentang 2,92-5,23 juta orang dan tambahan jumlah orang miskin dalam rentang 1,89-4,86 juta orang (Gambar 9)



Gambar 9. Indikator Kesejahteraan (Sumber : BPS dan proyeksi BKF, 2021)



Gambar 10. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (% , yoy) masa pandemic dan APBN 2021 (Sumber : BPS, 2020)



Gambar 12. Realisasi Program PEN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020)



Gambar 13. Peran belanja pemerintah terhadap belanja APBN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020)

Uraian (triliun rupiah)	2019 Realisasi	2020				
		APBN	Perpres 72/2020	Realisasi Semestara	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.960,6</b>	<b>2.233,2</b>	<b>1.699,9</b>	<b>1.633,6</b>	<b>96,1</b>	<b>(16,7)</b>
I. Penerimaan Pajak	1.332,7	1.642,6	1.198,8	1.070,0	89,3	(19,7)
II. Kepabeanan & Cukai	213,5	223,1	205,7	212,8	103,5	(0,3)
III. PNPB	409,0	367,0	294,1	338,5	115,1	(17,2)
IV. Hibah	5,5	0,5	1,3	12,3	945,8	123,7
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.309,3</b>	<b>2.540,4</b>	<b>2.739,2</b>	<b>2.589,9</b>	<b>94,6</b>	<b>12,2</b>
I. BPP	1.496,3	1.683,5	1.975,2	1.827,4	92,5	22,1
1. Belanja K/L	873,4	909,6	836,4	1.055,0	126,1	20,8
2. Belanja Non K/L	622,9	773,9	1.138,9	772,3	67,8	24,0
a. Pembayaran Bunga Utang	275,5	295,2	338,8	314,1	92,7	14,0
b. Subsidi	201,8	187,6	192,0	196,2	102,2	(2,8)
II. TKDD	813,0	856,9	763,9	762,5	99,8	(6,2)
1. Transfer ke Daerah	743,2	784,9	692,7	691,4	99,8	(7,0)
2. Dana Desa	69,8	72,0	71,2	71,1	99,9	1,8
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(73,1)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>(700,4)</b>	<b>(642,2)</b>	<b>91,7</b>	<b>778,1</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(348,7)</b>	<b>(307,2)</b>	<b>(1.039,2)</b>	<b>(956,3)</b>	<b>92,0</b>	<b>174,3</b>
% thd PDB	(2,20)	(1,76)	(6,34)	(6,09)		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>402,1</b>	<b>307,2</b>	<b>1.039,2</b>	<b>1.190,9</b>	<b>114,6</b>	<b>196,2</b>
SILPA/(SIKPA)	53,4	-	-	234,7		

Gambar 11. Realisasi sementara APBN 2020 (Sumber : Kemen Keu, 2020)

Menurut Kementerian Keuangan, realisasi program PEN 2020 dinyatakan cukup optimal dengan realisasi mencapai Rp579,78 T (83,4% dari Rp 695,2 T) dan Silpa earmark Rp50,94 T (Gambar 12, 13)

Terkait dengan beberapa sektor di unit produksi, selama pandemic ini sebagian sektor berdaya tahan (resilient) tumbuh positif, sebagian besar sektor strategis yang menghadapi tekanan telah menunjukkan arah pemulihan, kontraksi industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan semakin moderat serta pemerintah hadir dalam memberikan bantuan bagi dunia usaha (Gambar 14)

Pada kegiatan ekspor dan impor selama pandemi telah menunjukkan peningkatan secara bertahap, aktivitas impor (barang modal dan bahan baku) yang meningkat menunjukkan geliat manufaktur, seiring peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia, kondisi ini turut mendorong ekspor. Peningkatan produksi untuk ekspor juga merespon permintaan pasar global.



Gambar 14. Tren pemulihan dari sisi produksi  
(Sumber : Kemen Keu, 2020)

Pemerintah telah membelanjakan Rp112,44T untuk mendukung keberlangsungan UMKM melalui subsidi bunga, penyaluran kredit melalui penempatan dana, Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM), pembebasan PPh Final dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Sebanyak 37 juta UMKM menerima setidaknya satu bantuan pemerintah. Debitur yang menerima subsidi bunga dan restrukturisasi utang mendapat manfaat kelonggaran cashflow dan mengurangi risiko Non Performing Loan (NPL). Survei-survei yang dilakukan LPEM-LD FEBUI, BRI Institute, LIPI dan ITB menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan berkat bantuan pemerintah. Sebagian besar penerima manfaat menggunakan dana PEN untuk modal kerja (membeli bahan baku).

#### IV. KESIMPULAN

Relaksasi kebijakan ekonomi yang telah diprogramkan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional sejak diumumkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, berakibat terjadinya trend pertumbuhan pada hampir semua sektor, ada yang tumbuh tinggi (sektor informasi dan kesehatan), moderat (pertanian, pendidikan, real estate, jasa keuangan dan asuransi), namun tentunya adanya

yang negatif moderat (industry pengolahan, pertambangan, perdagangan, konstruksi), negatif dalam (akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan).

Capaian Indonesia di tahun 2020 merupakan langkah besar dan terukur untuk menghadapi pandemi, dengan melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM, demikian juga terhadap tekanan ekonomi dan fiskal yang lebih baik dibanding dengan banya negara lain.

Untuk 2021 sendiri, diproyeksikan pemulihan ekonomi akan berlanjut dengan tumbuh sekitar 4,5 – 5,3 %, dengan poin estimasi 5%. Program vaksinasi yang sudah berjalan di tahun 2021 (dari data per tanggal 4 Oktober 2021, vaksinasi ke-1 sejumlah 93.780.446 dengan kenaikan sejumlah 713.952 dan vaksinasi ke-2 sejumlah 52.676.052 dengan kenaikan 359.486. Dengan diadakan vaksinasi yang lebih massal diharapkan tingkat herd immunity semakin baik dan menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. APBN 2021 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

#### V. DAFTAR PUSTAKA

Artikel DKJN, Mengawal Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (2021), diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13212/Mengawal-Pemulihan-Ekonomi-Pasca-Pandemi-Covid-19.html>

Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid-19 (2020), Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2020, No. ISBN: 978-602-438-341-1

Konferensi Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, APBN Kinerja dan Fakta

Juni 2020, diakses dari  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Rencana kebijakan Fiscal 2021, diakses dari  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/rencana-kebijakan-fiskal-2021-siapkan-kondisi-normal-baru-dan-pemajakan-baru/>

Solow, Robert M. (2000), *Growth Theory: An Exposition 2<sup>nd</sup> Edition*, Oxford University Press, ISBN 978-0195109030

Tinjauan Big Data Terhadap Dampak Covid-19 (2020), Badan Pusat Statistik, Jakarta, No. ISBN: 978-602-438-342-8

WHO (2020), Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Report – 10,  
[https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-situation-report-10.pdf?sfvrsn=a9ceb157\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-situation-report-10.pdf?sfvrsn=a9ceb157_2)